

Judul : RUU Sisdiknas Ditargetkan Masuk Prolegnas Mei 2022
Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

RUU Sisdiknas Ditargetkan Masuk Prolegnas Mei 2022

■ RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dapat masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada Mei 2022. Mereka juga menargetkan RUU Sisdiknas sudah dapat disahkan pada 2023.

"Prolegnas itu kami targetkan akhir bulan ini atau bulan April kita ajukan. Jadi, semoga Mei sudah bisa masuk sebagai Prolegnas Prioritas. Kami secara internal akan senang kalau tahun depan ini bisa disahkan," ujar Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo, dalam dialog

daring, dikutip Ahad (13/3).

Nino, sapaan akrabnya, menyampaikan, Kemendikbudristek pada dasarnya tidak terburu-buru membentuk RUU Sisdiknas. Menurut dia, Kemendikbudristek menyadari proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan banyak pihak.

"Tidak dalam waktu sebulan dua bulan terus kita ingin disahkan. Kita sadar ini prosesnya harus melibatkan banyak pihak. Ada banyak pemangku kepentingan yang harus diperhatikan," kata Nino.

Dia juga mengakui, pembentukan RUU Sisdiknas masih akan memakan waktu panjang. Saat ini, proses penyusunan masih ada di tahap perencanaan.

Di tahap perencanaan itu, Kemendikbudristek telah banyak melibatkan publik. Karena itu,

ia membantah pernyataan bahwa Kemendikbud menutup akses publik kepada rancangan RUU Sisdiknas.

"Tanpa kehebohan sekalipun, naskahnya akan kami buka pada saat yang tepat. Tapi, saat ini, masih pada tahap perencanaan dan kita masih merevisi draf pertama berdasarkan berbagai masukan dari berbagai pihak," kata dia.

RUU Sisdiknas akan menyatukan tiga UU itu, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak agar pembahasan RUU Sisdiknas ditunda karena Kemendikbudristek dianggap tidak transparan dan tergesa-gesa.

■ ed: ratna puspita